

Temuan BPK Dapat Ditindaklanjuti

PONTIANAK. Temuan BPK yang sudah lewat tiga bulan, semestinya dapat ditindaklanjuti oleh Kejaksaan, sebagai petunjuk awal untuk mengurai lebih jauh, bagaimana sebetulnya praktik dugaan penyimpangan, termasuk pajak.

Bagaimana modus operandi itu terjadi dan siapa aktor-aktor dibelakangnya, siapa yang akan diminta pertanggungjawaban, apabila temuan tersebut masuk pada pelanggaran hukum.

"Mestinya temuan BPK itu ditindaklanjuti Kejaksaan. Apalagi terkait penyajian laporan kelengkapan alat-alat bukti terhadap dugaan penyimpangan, termasuk dugaan kebocoran pajak," ungkap Hermawansyah, aktivis Lembaga Gemawan, kemarin.

Adanya temuan BPK, tentu saja penegak hukum, khususnya Kajati dapat menindaklanjutinya. Temuan dugaan penyimpangan bisa dijadikan sebagai petunjuk awal untuk mengurai lebih jauh bagaimana sebetulnya praktik penyimpangan itu dilakukan. Biasanya ada perdebatan soal posisi dan legal status audit dari BPK.

Apakah bisa langsung dijadikan alat bukti atau tidak, ketika dibawa ke pengadilan.

Sehingga dalam konteks tersebut, sebelum dibawa ke pengadilan, Kejaksaan juga menggunakan jasa BPKP sebagai auditor internal pemerintah. "Dalam perspektif hukum, audit BPK menjadi alat bukti ketika disampaikan ke pengadilan," pungkasnya. (oen)